

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Hasil-hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab IV di muka menunjukkan bahwa, Program Pemantapan Kerja Guru di Kotamadya Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Pidie telah dikelola dengan baik. Pengelolaan Program Pemantapan Kerja Guru tersebut telah dilaksanakan secara efektif, namun belum menyeluruh.

Selanjutnya, bila ditinjau dari proses serta unsur-unsur yang terlibat dalam pengelolaan Program Pemantapan Kerja Guru tersebut, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Perencanaan Program Pemantapan Kerja Guru

- a. Personil yang terlibat dalam proses perencanaan Program Pemantapan Kerja Guru terdiri atas, (1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggungjawab kebijaksanaan di daerah, (2) Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan serta Pimpinan Bagian Proyek Pengadaan Alat Ilmu-Ilmu Alam dan Peman-tapan Kerja Guru (Pimbagpro PAIIA dan PKG) sebagai penanggungjawab teknis, (3) Pengawas (yang ditunjuk sebagai PJPP) sebagai penang-gungjawab program, (4) Instruktur dan Guru Inti sebagai penanggungjawab akademis, dan terakhir (5) Panitia sebagai penanggungjawab pelaksana. Masing-masing unsur tersebut menyusun rencana kegiatan dalam bidangnya dengan dikoordinir oleh Penanggungjawab teknis (Pimbagpro PAIIA dan PKG).

Secara umum fungsi perencanaan yang dilaksanakan oleh kelima unsur tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) katagori, yaitu (1) perencanaan dalam bidang teknis administra-tif yang dilakukan oleh Kabagpro PAIIA dan PKG, dan (2) perencanaan dalam bidang akademis yang dilakukan oleh Instruktur dan Guru Inti.

Teknis administratif yang dikelola oleh Bagpro PAIIA dan PKG meliputi penetapan rencana kegiatan dalam bentuk jadwal pelaksanaan ke-giatan dan memberikan tugas kepada Instruktur dan Guru Inti untuk melaksnakan Latihan Kerja

Pemantapan Kerja Guru (LKPKG), Latihan Kerja Guru Inti (LKGI), Latihan Kerja Guru (LKG), beserta penyiapan fasilitas dan anggaran yang akan dipergunakan. Sementara itu penanggungjawab akademis (Instruktur dan Guru Inti) menyusun materi yang akan diberikan dalam Latihan Kerja Guru Inti dan Latihan Kerja Guru.

Melihat dari komposisi personil yang terlibat dalam penyusunan rencana tersebut maka, dapat dikatakan bahwa untuk penyusunan rencana Program Pemantapan Kerja Guru yang kerkenaan dengan teknis administratif telah efektif, yaitu personil yang terlibat tidak terlalu banyak namun dapat menghasilkan rencana kegiatan yang baik. Demikian juga halnya dengan penyusunan rencana dalam bidang akademis dapat dikatakan efektif.

- b. Dalam penyusunan rencana kegiatan Program Pemantapan Kerja Guru tidak dijelaskan berapa besar biaya yang dipergunakan, namun besarnya upah untuk setiap bulan, untuk masing-masing unsur pengelola proyek dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) Untuk penanggungjawab kebijaksanaan (Kakanwil dan Koordinator Urusan

Administrasi) sebagai pembina memperoleh upah sebesar Rp 38,000, (2) Penanggungjawab teknis (Pimbagpro PAIIA dan PKG) memperoleh Rp 77,000, (3) Bendaharawan Bagpro PAIIA dan PKG Rp 57,000 (4) Sekretaris Bagpro PAIIA dan PKG Rp 35,000, (5) Satu orang Pembantu bendaharawan Bagpro PAIIA dan PKG sebesar Rp 32,000, dan (6) Satu orang Staf Bagpro PAIIA dan PKG (pelaksana) sebesar Rp 32,000, (Laporan tahunan Bagpro PAIIA dan PKG Daerah Istimewa Aceh tahun 1992/1993)

Dilihat dari segi efisiensi, karena outputnya adalah rencana kegiatan untuk setahun maka penggunaan biaya tersebut adalah efisien, karena di samping menyusun rencana kegiatan mereka juga sehari-harinya melayani segenap unsur yang terlibat dalam Program Pemantapan Kerja Guru. Bila dilihat dari segi efektivitas, maka penggunaan biaya tersebut kurang efektif karena hanya tertuju pada proses kegiatan di Bagpro dan kurang memperhatikan pada hasil yang akan dicapai.

- c. Unsur material, alat-alat dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam proses perencanaan kegiatan

Program Pemantapan Kerja Guru hanya terbatas pada alat tulis kantor berupa kertas, mesin ketik dan komputer serta alat penggandaan lainnya, baik yang habis terpakai maupun yang tidak habis terpakai. Pengadaan alat dan bahan tersebut dikelompokkan ke dalam pengeluaran untuk pos Administrasi Bagpro selama satu tahun, yang jumlahnya bervariasi setiap tahunnya. Sebagai contoh, untuk tahun 1990/1991 biaya yang dipergunakan untuk pos tersebut adalah sebesar Rp 23.038.000 dan tahun 1991/1992 adalah sebesar Rp 26.776.000,00. (Laporan tahunan Bagpro PAIIA dan PKG Daerah Istimewa Aceh, tahun 1991/1992 dan tahun 1992/1993).

Dari segi efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan tersebut kurang efisien, karena belum maksimalnya pemanfaatan komputer sebagai alat bantu untuk menghimpun segenap data yang diperlukan untuk pelaksanaan Program Pemantapan Kerja Guru. Komputer hanya dipergunakan sebagai mana penggunaan mesin ketik, bahkan ada komputer yang ditempatkan di sanggar tidak bisa difungsikan sama sekali, karena kondisi komputernya tidak mungkin untuk dipergunakan.

- Dari segi efektivitas, tentunya tidak efektif karena kehadiran komputer dengan tujuan untuk membantu proses administrasi dengan membentuk sistem informasi yang akurat dan cepat tidak akan terwujud.
- d. Unsur ekspertis yang terlibat dalam proses perencanaan dalam segi teknis Program Pemantapan Kerja Guru adalah orang-orang yang memegang jabatan struktural pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, seperti Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kabagpro PAIIA dan PKG. Padahal ekspertis yang diharapkan adalah ahli perencanaan pendidikan umum, bidang studi, pembiayaan pendidikan, keuangan, dan lain-lain yang sesuai dengan bidangnya. Dengan demikian ekspertis di sini belum efektif, dalam arti belum menggunakan tenaga ahli dalam bidangnya.
- e. Unsur Partisipasi dalam penyusunan rencana program Pemantapan Kerja Guru meliputi Pengawas (PJPP), Instruktur, Guru Inti dan Koordinator Sanggar Pemantapan Kerja Guru. Kepala Sekolah yang gurunya akan mengikuti Program Pemantapan Kerja Guru tidak dilibatkan, walaupun ada hanya

mengikuti Latihan Kerja Kepala Sekolah (LKKS). Itu pun belum semua Kepala Sekolah mendapat giliran untuk mengikuti LKKS. Padahal peran mereka cukup besar dalam membina guru-guru yang mengikuti Latihan Kerja Guru pada saat melaksanakan *on-service*. Dengan demikian unsur partisipasi dalam perencanaan Program Pemantapan Kerja Guru belum efektif.

Memperhatikan proses perencanaan penyusunan program PKG serta substansinya tersebut di atas, serta memperhatikan kriteria efektivitas yang telah dikemukakan di dalam BAB III (lihat prosedur analisis data, halaman 84-86), maka proses perencanaan Program Pemantapan Kerja Guru di Daerah Istimewa Aceh belum dapat dikatakan efektif. Dikatakan demikian karena penyusunan rencana kegiatan program PKG masih nampak monoton dan lebih mencerminkan suatu kegiatan yang rutin. Mekanisme perencanaan kurang berjalan, karena unsur-unsur yang seharusnya terlibat dalam proses penyusunan rencana kegiatan masih jarang terlibat dengan aktif.

2. Pelaksanaan Program Pemantapan Kerja Guru

a. Realisasi kegiatan Program Pemantapan Kerja

Guru meliputi pelaksanaan : (1) Latihan Kerja Pemantapan Kerja Guru, (2) Latihan Kerja Guru Inti, (3) Latihan Kerja Guru. Untuk mendukung sistem Program Pemantapan Kerja Guru dilaksanakan juga Latihan Kerja Kepala Sekolah, Latihan Kerja Pengawas, Penataran Pengelolaan Penggunaan Pemeliharaan dan Perbaikan Alat IPA, serta Penyelenggaraan Sistem Informasi Operasional Sekolah.

Program Pemantapan Kerja Guru di tiga daerah tingkat dua yang dijadikan wilayah penelitian ini berjalan dengan baik, artinya, semua rencana kegiatan Program Pemantapan Kerja Guru dapat dilaksanakan. Dengan demikian realisasi program adalah efektif.

- b. Realisasi biaya per kegiatan pada umumnya masih terdapat sisa anggaran. Secara keseluruhan pada tahun 1990/1991 terdapat sisa anggaran yang tidak besar yaitu sebanyak Rp 69.868,00 (Enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah). Tetapi untuk tahun anggaran 1991/1992 sisa anggaran cukup besar yaitu sebanyak Rp 33.932.353,00 (Tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus

lima puluh tiga rupiah),--(Laporan tahunan Bagpro PAIIA dan PKG Daerah Istimewa Aceh tahun 1991/1992 dan 1992/1993). Karena yang dijadikan ukuran efektivitas adalah terserapnya seluruh anggaran untuk melaksanakan Program Pemantapan Kerja Guru, maka realisasi anggaran tersebut masih belum efektif.

- c. Penyelesaian kegiatan Program Pemantapan Kerja Guru yang meliputi (1) Latihan Kerja Pemantapan Kerja Guru, (2) Latihan Kerja Guru Inti, dan (3) Latihan Kerja Guru. Di samping itu untuk mendukung sistem Program Pemantapan Kerja Guru dilaksanakan juga Latihan Kerja Kepala Sekolah, Latihan Kerja Pengawas, Penataran Pengelolaan Pendayagunaan Pemeliharaan dan Perbaikan Alat IPA, serta Penyelenggaraan Sistem Informasi Operasional Sekolah dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Dengan demikian waktu pelaksanaan Program Pemantapan Kerja Guru adalah efektif.

Memperhatikan dan menganalisis proses pelaksanaan program PKG serta berbagai substansinya tersebut di atas, serta memperhatikan kriteria efektivitas tentang pelaksanaan program PKG yang dikemukakan pada

Bab III (halaman 84-86), maka dapat dikemukakan bahwa proses perencanaan Program Pemantapan Kerja Guru di Daerah Istimewa Aceh masih belum dapat dikatakan efektif. Hal ini karena pelaksanaan program baru berhasil dalam hal melaksanakan kegiatan, tetapi masih kurang menyentuh pencapaian tujuan program PKG, yaitu membuat sekolah yang mampu melaksanakan proses belajar mengajar secara lebih efektif. Di samping itu guru-guru yang telah pernah mengikuti Latihan Kerja Guru masih kurang mengimbaskan pengalaman dan pengetahuan tentang Program Pemantapan Kerja Guru kepada guru-guru lain yang belum pernah mengikuti.

3. Pengawasan Program Pemantapan Kerja Guru

- a. Personil yang mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Program Pemantapan Kerja Guru adalah Penanggung Jawab Pelaksanaan Program (PJPP) beserta Pimbagpro PAIIA dan PKG. Sedangkan yang mengawasi dalam bidang akademis adalah Penanggung Jawab Bidang Akademis (PJBA), Instruktur dan Guru Inti. PJBA bersama-sama dengan Instruktur mengawasi Guru Inti dalam mengelola Latihan Kerja Guru, sedangkan Guru Inti mengawasi guru-guru peserta Latihan Kerja

Guru dalam mengikuti *in-service* dan melaksanakan *on-service*. Dengan demikian maka pengawasan berjalan dengan baik dan efektif.

- b. Sasaran pengawasan adalah sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing. Pengawasan dalam bidang teknis administratif adalah untuk melihat kemungkinan-kemungkinan hambatan yang terjadi dalam segi teknis. Sehingga dapat diperbaiki pada saat proses kegiatan berlangsung. Sedangkan pengawasan dalam bidang akademis adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi secara akademis dan mengadakan pembinaan. Dengan demikian, maka pengawasan yang dilaksanakan adalah efektif.
- c. Proses pengawasan dilaksanakan pada saat proses kegiatan Program Pemantapan Kerja Guru berlangsung dan juga pada saat kegiatan telah selesai. Pengawasan dalam segi teknis administratif dan teknis akademis dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik supervisi. Jadi, proses pengawasan selalu diikuti dengan pembinaan bila diperlukan.

Kesimpulan yang dapat ditarik, dengan menggunakan kriteria efektivitas (halaman, 84-86), adalah

bahwa pengawasan Program Pemantapan Kerja Guru telah efektif bila yang dilihat adalah personil yang melaksanakan dan mekanismenya, namun bila pengawasan itu dihubungkan dengan upaya pencapaian tujuan maka pengawasan yang dilakukan belum cukup efektif, karena belum mencerminkan upaya pengawasan yang memberikan kontribusi terhadap upaya pencapaian tujuan program secara lebih efektif, sekali pun proses pengawasan yang dilaksanakan telah sering menerapkan prinsip-prinsip supervisi pendidikan.

B. Rekomendasi

Hasil-hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV di muka bahwa: (1) sebelum pelaksanaan Program Pemantapan Kerja Guru di tempuh suatu perencanaan dengan melibatkan berbagai unsur, namun kurang mencerminkan mekanisme yang diharapkan dalam proses perencanaan; (2) pelaksanaan Program Pemantapan Kerja Guru di Kotamadya Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie telah diprogram secara sistematis, namun masih terkesan monoton karena masih mencerminkan kegiatan rutin dengan perubahan ke arah perbaikan yang agak lambat; (3) Ketua Sanggar sebagai pengelola kegiatan Program Pemantapan Kerja Guru di

Gedung Sanggar masih kurang dapat memberikan kontribusinya, hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran terutama untuk perawatan dan kebutuhan rutin Sanggar; (4) kepala sekolah masing sering dipengaruhi oleh birokrasi pemerintahan dalam mengelola pendidikan di sekolah; dan (5) pengawasan terhadap kegiatan program PKG yang masih kurang efektif, karena hanya dilaksanakan manakala proyek PKG dilaksanakan, sehingga kurang dapat mengamati perkembangan yang terjadi pada guru-guru mantan peserta Latihan Kerja Guru. Sehubungan dengan hal itu maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kudayaan Daerah Istimewa Aceh

Sebagai penanggung jawab utama pengelolaan Program Pemantapan Kerja Guru di Daerah, hendaknya pihak Kantor Wilayah menyusun suatu Tim yang berfungsi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Program Pemantapan Kerja Guru yang telah dilakukan. Penilaian tersebut dilakukan secara rutin pada setiap putaran pelaksanaan program, dengan tujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada masing-masing putaran tersebut. Agar Tim tersebut memberikan penilaian yang objektif maka perlu diikutsertakan *pihak luar* dan

yang memahami pelaksanaan Program Pemantapan Kerja Guru.

Hasil penilaian tersebut hendaknya dapat menjadi bahan masukan yang paling berguna bagi penyusunan rencana kegiatan untuk putaran Program Pemantapan Kerja Guru berikutnya. Untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif dalam penilaian, maka pihak luar yang dilibatkan dalam proses penilaian hendaknya mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang beragam, sehingga kelemahan pelaksanaan Program Pemantapan Kerja Guru dapat ditinjau dari beberapa sudut. Untuk keperluan itu, maka pihak luar yang dilibatkan haruslah benar-benar ahli dalam bidangnya.

Untuk memperoleh rencana kerja yang baik pihak Kanwil Depdikbud dapat menyusun suatu mekanisme perencanaan program PKG yang melibatkan semua unsur terkait dalam program PKG.

2. Kepada Bagpro PAIIA dan PKG

Sistem penyusunan rencana kegiatan Program Pemantapan Kerja Guru yang selama ini dilakukan oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan Program (PJPP), baru kemudian dikonfirmasi kepada Instruktur dan Guru Inti, terkesan merupakan kegiatan *rutin*. Sistem yang

demikian akan membuat Instruktur dan Guru Inti sebagai orang yang terjun langsung dalam Program Pemantapan Kerja Guru menjadi pasif dan seolah-olah mereka hanya melaksanakan pekerjaan rutin tanpa ada misi khusus.

Agar rencana kegiatan Program Pemantapan Kerja Guru dapat efektif hendaknya Kepala Sekolah yang gurunya telah dan akan mengikuti Program Pemantapan Kerja Guru turut dilibatkan dalam proses perencanaan program PKG. Dengan bekal telah mengikuti Latihan Kerja Kepala Sekolah (LKKS), para Kepala Sekolah diharapkan dapat berfungsi efektif bersama-sama dengan Instruktur dan Guru Inti dalam membina guru-guru peserta Latihan Kerja Guru.

Untuk mengaktifkan Instruktur dan Guru Inti serta Kepala Sekolah dalam penyusunan Program Pemantapan Kerja Guru, Bagpro PAIIA dan PKG hendaknya menyusun suatu sistem perencanaan yang melibatkan mereka dalam proses penyusunan rencana kegiatan Program Pemantapan Kerja Guru. Hal ini perlu dikemukakan karena selain Instruktur dan Guru Inti, Kepala Sekolah juga merupakan orang yang paling dekat dengan guru-guru peserta Latihan Kerja Guru pada saat melaksanakan *on-service*. Selain itu hasil dari Latihan

Kerja Guru langsung dirasakan manfaatnya oleh sekolah dimana guru-guru tersebut bertugas. Ini artinya kepala sekolah juga terlibat langsung.

Khusus mengenai pengadaan alat-alat IPA, yang selama ini dikelola langsung oleh Proyek Pusat, hendaknya dapat dikelola di daerah. Dengan pengelolaan di daerah maka kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya dalam mata pelajaran IPA dapat disesuaikan dengan bahan atau alat yang dikirim. Atau kalau hal ini tidak mungkin, pihak Bagpro PAIIA dan PKG dapat menyusun alat dan bahan kebutuhan yang diperlukan dalam pelajaran IPA di daerah ini. Penyusunan alat dan bahan yang dibutuhkan hendaknya melibatkan unsur Sanggar dan Kepala Sekolah, sehingga alat dan bahan yang dikirim ke daerah benar-benar yang dibutuhkan. Dengan demikian maka pengadaan alat dan bahan tersebut dapat efektif menunjang Program Pemantapan Kerja Guru.

Tentang regenerasi Instruktur dan Guru Inti hendaknya mendapatkan perhatian serius. Di samping itu rasio Instruktur dan Guru Inti terhadap banyaknya guru atau sekolah juga perlu mendapatkan perhatian. Dengan demikian bila seorang Instruktur atau Guru Inti sudah tidak dapat difungsikan lagi, karena

sebab-sebab tertentu, maka dengan cepat dapat diganti oleh Instruktur atau Guru Inti yang lain.

3. Kepada Penanggung Jawab Pelaksanaan Program

Sebagai pihak yang bertanggungjawab atas penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan Program Pemantapan Kerja Guru, Penanggung Jawab Pelaksanaan Program (PJPP) hendaknya tidak hanya aktif dalam proses penyusunan rencananya saja, yang lebih penting adalah aktif dalam *mengawasi* pelaksanaan Program Pemantapan Kerja Guru sebagaimana aktifnya Instruktur dan Guru Inti dalam membina guru-guru yang mengikuti Latihan Kerja Guru. Pengawasan yang dilakukan hendaknya tidak hanya terbatas pada terlaksananya rencana berdasarkan perencanaan, yang lebih penting justru mengefektifkan pengawasan untuk lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PKG. Fungsi ini berkaitan dengan penataran yang telah diikutinya, yaitu Latihan Kerja Pengawas (LKP). Dengan demikian, Penanggung Jawab Pelaksanaan Program (PJPP) yang juga adalah Pengawas pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dapat melaksanakan fungsi pembinaan sekaligus dengan fungsinya dengan Penanggung Jawab Pelaksanaan Program.

Agar pelaksanaan program yang telah disusun berjalan efektif, maka Penanggung Jawab Pelaksanaan Program (PJPP) selain mengikuti jalannya Program Pemantapan Kerja Guru juga mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai. Hasil penilaian tersebut dijadikan bahan masukan untuk penyusunan rencana kegiatan putaran program PKG berikutnya.

Untuk mendapatkan umpan balik yang terbaik, maka hasil penilaian yang dilakukan oleh Penanggung Jawab Pelaksanaan Program selaku penyusun rencana kegiatan dapat dikombinasikan dengan hasil Tim peneliti yang dibentuk di tingkat Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Kepada Penanggung Jawab Bidang Akademis (PJBA)

Laporan kegiatan Sanggar yang rutin dibuat oleh Ketua Sanggar disampaikan kepada Pimbagpro PAIIA dan PKG, Koordinator Sanggar masing-masing bidang studi dan juga disampaikan kepada Penanggung Jawab Bidang Akademis, hendaknya memberi arti positif bagi Penanggung Jawab Bidang Akademis (PJBA), terutama dalam menganalisis laporan dari segi akademis bersama Penanggung Jawab Pelaksanaan Program (PJPP), untuk dijadikan bahan masukan dalam menyusun rencana ke-

giatan pengelolaan Latihan Kerja Guru Inti (LKGI) dan Latihan Kerja Pemantapan Kerja Guru (LKPKG).

Penanggung Jawab Bidang Akademis (PJBA) mempunyai peran aktif dalam menyusun dan menyampaikan daftar kebutuhan bahan, alat tulis dan alat praktek yang menunjang pelaksanaan Program Pemantapan Kerja Guru. Karena kekhawatiran daftar usulan kebutuhan yang disusun oleh Penanggung Jawab Bidang Akademis (PJBA) tidak semuanya dipenuhi oleh pihak Bagpro PAIIA dan PKG, maka perlu dibedakan antara alat dan bahan yang merupakan kebutuhan mendesak dan yang dapat ditunda tetapi juga harus dipenuhi.

Dalam melaksanakan fungsinya Penanggung Jawab Bidang Akademis hendaknya lebih besar memberi perhatian kepada upaya pendalaman materi yang diberikan kepada Guru Inti ataupun kepada guru-guru peserta Latihan Kerja Guru. Untuk lebih efektif upaya tersebut maka pendalaman materi itu harus diikuti dengan pembinaan yang intensif.

5. Kepada Ketua Sanggar Pemantapan Kerja Guru

Secara rutin, yaitu tiap akhir satu putaran program, pihak Ketua Sanggar membuat laporan tentang pelaksanaan program, baik yang menyangkut keberhasilan dan hambatan-hambatan yang dijumpai. Keberhasilan

yang dikemukakan hendaknya tidak hanya dalam bentuk terselesainya program dijalankan, tetapi harus juga dikemukakan saran-saran yang bisa meninggikan tingkat keberhasilan program di masa berikutnya.

Demikian juga halnya tentang masalah beberapa hambatan yang dijumpai di lapangan (Sanggar), harus dikemukakan secara rinci. Mengapa hal itu terjadi? Dan sebagai tindak lanjutnya, dalam membuat saran kepada pihak Penanggung Jawab Bidang Akademis (PJBA), atau Penanggung Jawab Pelaksanaan Program (PJPP), ataupun Bagpro PAIIA dan PKG dikemukakan pihak mana yang akan dihubungi untuk menghindari hambatan serupa pada putaran berikutnya. Pemanfaatan alat dan bahan untuk praktikum selama kegiatan di sanggar hendaknya menjadi perhatian, agar alat dan bahan yang dipergunakan dapat bertahan lama, karena alat-alat tersebut (terutama untuk alat-alat IPA) dibiayai oleh pusat dan tidak secara rutin.

6. Kepada Instruktur dan Guru Inti

Sebagai pihak yang terjun langsung ke dalam kancah Program Pemantapan Kerja Guru, pihak Instruktur dan Guru Inti telah cukup aktif melaksanakan fungsinya, baik dalam kegiatan *in-service* maupun

pada kegiatan *on-service*. Keaktifan ini hendaknya tetap dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, agar tujuan Program Pemantapan Kerja Guru terus berjalan ke tingkat yang lebih baik.

Pengawasan terhadap kegiatan Latihan Kerja Guru yang dikelola oleh Guru Inti hendaknya lebih besar mengarah kepada upaya pembinaan terhadap permasalahan yang dihadapi guru-guru ketika melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Perbedaan latar belakang dan tingkat pendidikan dan perbedaan dalam pengalaman mengajar yang menyebabkan kemampuan guru-guru berbeda hendaknya selalu dipertimbangkan dalam melaksanakan supervisi terhadap mereka. Dengan demikian guru-guru dapat merasakan bantuan pembinaan yang diberikan oleh Instruktur atau Guru Inti terutama dalam melihat dengan jelas proses belajar mengajar sebagai suatu sistem, melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan, membantu guru-guru dalam menyusun kegiatan belajar mengajar, menggunakan sumber-sumber dan pengalaman belajar, dan sebagainya, (lihat Piet Sahertian dan Frans Mataheru, 1981).

Perlu pula dikembangkan suatu forum kerja sama untuk masing-masing kelompok Instruktur dan Guru Inti sejenis untuk mendiskusikan dan mengembangkan cara-

cara yang lebih baik dalam menyampaikan materi pelajaran. Untuk memperoleh hasil yang lebih baik forum tersebut dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli lain (dari Universitas Syiah Kuala) untuk mendalami materi pelajaran masing-masing. Di samping itu Instruktur dan Guru Inti perlu secara terus menerus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian jalur karir guru yang lebih baik dapat dicapai.



